

E-Government: Konsep dan Implementasinya

Rino A Nugroho S.Sos, M.T.I

Disampaikan di seminar egovernment UNS Solo 26/11/2008

e-Gov

- Penggunaan ICT pada umumnya dan e-commerce pada khususnya untuk menyediakan akses yang lebih nyaman ke informasi dan pelayanan pemerintah serta penghantaran pelayanan pemerintah. (Turban)
- *E-gov refers to the use by government agencies of IT (WAN, internet & mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government.* (World Bank)

E-Gov

Berdasarkan 2 definisi tsb dapat ditarik kesamaan:

1. Merupakan mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan stakeholders (pemangku kepentingan).
2. Melibatkan penggunaan TI
3. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah.

Tipe Interaksi e-Gov

1. **A2C (Administrations to citizens)/ G2C**
 - Menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat
 - Bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat
 - Contoh implementasi: website pemerintah, SIMTAP
2. **A2B (Administrations to business)/ G2B**
 - Menghubungkan antara pemerintah dengan dunia usaha
 - Bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah
 - Contoh implementasi: pengadaan barang/jasa online (electronic procurement)

3. **A2A (Administration to Administration) /G2G**

- Hubungan horizontal antar instansi pemerintah (baik dalam negeri maupun luar negeri)
 - Bertujuan untuk mempercepat transaksi data antar instansi
 - Contoh implementasi: sistem cekal depkumham, sistem Interpol, jaringan LAN intra instansi
- Hubungan vertikal antar instansi pemerintah dengan pegawainya
 - Bertujuan untuk mempercepat tersebarnya informasi dalam instansi pemerintah
 - Contoh implementasi: Sistem Kepegawaian, Sistem Gaji Pegawai

Tahapan dalam E-Gov

1. **Emerging:**
 - Web pemerintah sudah hadir meski masih terpecah-pecah
 - Informasi yang disediakan masih terbatas, medasar dan statis
2. **Enhanced:**
 - Informasi yang disediakan sudah sering di-update
3. **Interactive:**
 - Publik bisa mengunduh (download) berkas untuk kepentingan mereka
 - Publik dapat berhubungan langsung dengan aparat publik.

4. Transactional:

- Pengguna dapat membayar pelayanan dan transaksi keuangan secara online.

5. Seamless:

- Integrasi seluruh pelayanan elektronik antar batas administrasi dan departemen

Electronic Government di Indonesia

Dasar Hukum

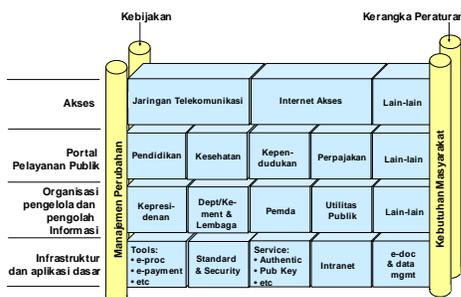
Inpres No 3 Tahun 2003, yang memiliki tujuan:

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)
- 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B)
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

Strategi Pengembangan eGov

- Pengembangan **sistem pelayanan** yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas
- Penataan **sistem manajemen dan proses kerja** pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik
- Pemanfaatan **teknologi informasi** secara optimal
- Peningkatan **peran serta dunia usaha dan pengembangan industri** telekomunikasi dan teknologi informasi
- Pengembangan **SDM** di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat
- Pelaksanaan pengembangan secara **sistematis** melalui tahapan yang realistis dan terukur

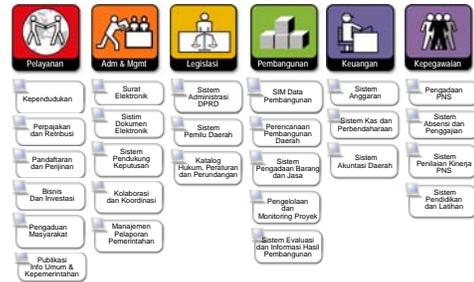
Kerangka Arsitektur eGov



- Akses:
 - jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik
- Portal Pelayanan Publik:
 - jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik
- Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi
 - organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

- Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi
 - organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni
 - penataan sistem manajemen dan proses kerja,
 - pemahaman tentang kebutuhan publik,
 - penguatan kerangka kebijakan, dan
 - pemapanan peraturan dan perundang-undangan

Kerangka Fungsi eGov di Pemda



Dimanakah eGov Kota Solo?

- Untuk mengukur eGov Kota Solo digunakan beberapa instrumen pengukuran
 - E Leadership
 - Posisi eGov Kota Solo dalam tahapan eGov
 - Trafik Internet website Pemkot Solo
 - Penggunaan TIK

E Leadership

- Kuatnya komitmen dari Walikota Solo yang ditunjukkan dari
 - Implementasi infrastruktur dan aplikasi TIK di Solo yang "mengagumkan" pasca terpilihnya walikota baru
- Kuatnya komitmen ini menjadi salah satu dasar dari suksesnya implementasi eGov di Kota Solo.

Tahapan eGov Pemkot Solo

- Analisa
 - Website diupdate secara reguler
 - Website sudah menyediakan fasilitas download dokumen
 - Website sudah menyediakan ruang untuk berkomunikasi dengan aparat pemkot melalui web, email dan sms
 - Adanya jaringan LAN di lingkungan Pemkot Solo

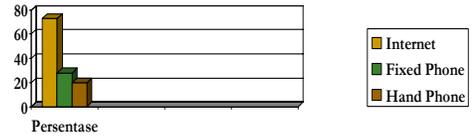
- Hasil
 - Pemkot Solo sudah mencapai tahap Interactive
 - Hubungan yang terbentuk adalah A 2 C dalam wujud website
 - A 2 A dalam wujud LAN, meskipun pemanfaatannya belum optimal.

Trafik Internet

- Analisa menggunakan Alexa.com benchmarking hasilnya adalah sbb:
 - Rata-rata website ini diakses oleh 369,399 pengguna (69 % dari total penduduk Kota Solo)
 - Pengakses terbanyak web ini adalah
 - Indonesia : 80,2 %
 - Japan : 19,8 %
 - Link yang banyak diakses adalah
 - Surakarta.go.id : 81 %
 - Dipenda.surakarta.go.id: : 10%
 - bko-disnaker.surakarta.go.id : 8%
 - Lainnya : 1%

Penggunaan TIK

- Survey membuktikan bahwa penggunaan perangkat TIK adalah sbb:



Kesimpulan

- eGov merupakan langkah untuk mengubah interaksi pemerintah dengan stakeholders
- eGov di Indonesia dilandasi dasar hukum Inpres No 3/2003
- eGov di Solo sudah berada di level Interactive
- Mengubah mindset dari electronic government menjadi mobile government